

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK WARIS ATAS TANAH JANDA TANPA KETURUNAN BERDASARKAN BUKTI PEMILIKAN HAK GONO GINI

Proses peralihan hak jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seringkali timbul dalam berbagai ragam permasalahan. Tata cara perolehan hak atas tanah tersebut menentukan kewenangan dari pemegang haknya untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. Peralihan hak waris atas tanah janda tanpa keturunan yang merupakan harta gono gini dalam perkawinannya harus mendapatkan persetujuan ahli waris yang lain dari almarhum suaminya.

Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli yang digunakan untuk peralihan hak waris atas tanah janda tanpa keturunan berdasarkan bukti pemilikan hak gono gini dan bagaimana konsep hak gono gini atas peralihan hak waris atas tanah janda tanpa keturunan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Sosio Legal yang berarti terdapat dua aspek penelitian, yang pertama aspek legal research yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti "norm" peraturan perundang-undangan dan kedua socio research yaitu digunakan metode dan teori ilmu-limu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini tetap dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda.

Hasil pembahasan permasalahan adalah peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar dapat menjamin kepastian hukumnya dan dapat menjadi alat bukti yang sah dan sebaiknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melakukan pemeriksaan secara teliti mengenai siapa pihak yang berhak dan berwenang terhadap hak atas tanah yang bersangkutan agar sah secara hukum, sesuai dengan hukum tanah nasional dan tidak menimbulkan konflik hukum.

Saran : Lurah dan Camat dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris harus lebih teliti, agar tidak terjadi kekeliruan pencantuman nama-nama ahli warisnya, sehingga memperkecil resiko terjadinya konflik hukum pada saat proses peralihan secara warisan tersebut dilanjutkan dengan jual beli kepada pihak ketiga.

Kata kunci : Hak Atas Tanah, Hak Waris Atas Tanah Janda Tanpa Keturunan, Hak Gono Gini.

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF TRANSFER OF RIGHT OVER LAND OWNED BY WIDOW OF NO DESCENDANT BASED ON "GONO GINI" RIGHT OWNERSHIP PROOF

The transition process of buying and selling right based on Government Regulation Number 24 of 1997 and Agrarian Minister Regulation number 3 of 1997 on land registration that occurs in community life often arise in a variety of problems procedure for the acquisition of land determines the authority of the rightholder to take legal action further.

Transition of inheritance right over land of widow without descendants which is "gono gini" property in the marriage must be approved by the other heirs of her late husband.

The problem is how the legal consequences of the deed of sale are used for transfer of right over land of widow without descendants based on Gono Gini proof of ownership rights and how the concept of the right Gono Gini for inheritance right over land owned by widow of no descendants.

The approach used in this study is a socio-legal approach which means that there are two aspects of research, the first aspect of the legal research object of research remains in the form of law in the sense of "norm" laws and regulations and socio research is to use the method and theory of social science on law to assist researchers in analysis. This approach is still in the realm of law, by using different perspective.

The result of the problem discussion is transfer of right to land must be done before the deed officials (PPAT) in order to ensure legal certainty and can be valid evidence and it is better the deed officials (PPAT) should examine carefully about who is entitled and authorized of the right over the land in order to lawfully in accordance with the national law of the land and do not cause legal conflict

Suggestions : Village chiefs and subdistrict head in making statement letter of heirs must pay closer attention, in order to avoid mistakes inclusion of the names of the heirs, thus minimalizing the risk of conflicts of law during the process of transition in legacy was continued by selling to third party

Keywords : Right over land, Inheritance right to land widow without descendants, " Gono Gini "